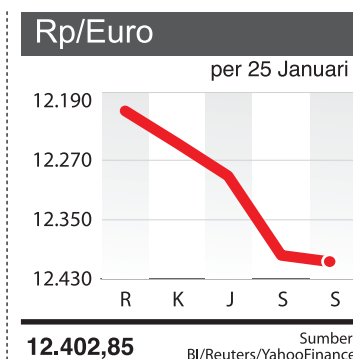
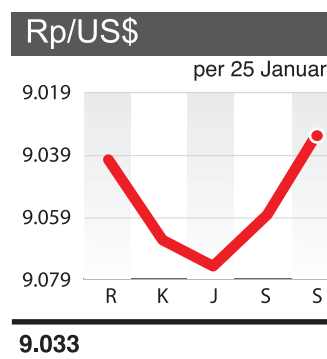
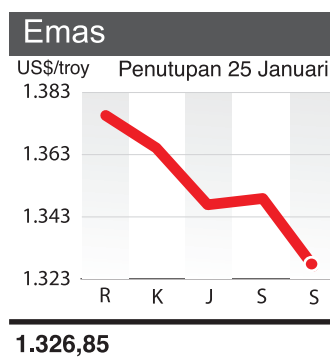
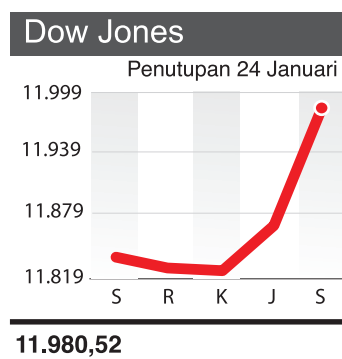
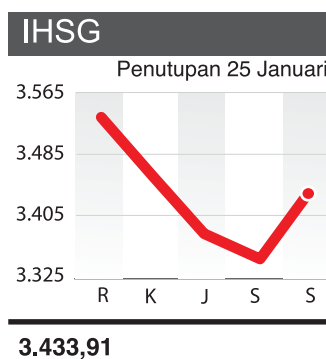
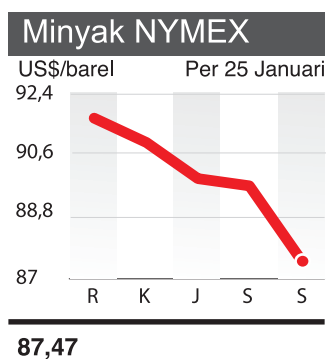




Tiwul Terakhir Keluarga Jamhamid

Gaplek olahan telah merenggut nyawa saat diversifikasi pangan mulai digantikan.

Fokus Nusantara, Hlm 22-23



Target Waktu Food Estate Mesti Dipersingkat

Idealnya infrastruktur diselesaikan tahun ini agar investor bisa masuk pada 2012.

ASNI HARISMI

RENCANA pemerintah membangun infrastruktur di Papua untuk mempercepat operasional *food estate* di Merauke atau Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) sudah tepat. Namun, target penyelesaian yang dipatok hingga 2014 dinilai terlalu lama dan tidak efektif untuk menggaet investor.

Hal itu dikatakan pengamat ekonomi pertanian dari Institut Pertanian Bogor Hermanto Siregar saat dihubungi *Media Indonesia*, kemarin. Menurutnya, langkah pemerintah menangani infrastruktur *food estate* di Papua sangat penting mengingat sarana dan prasarana di provinsi tersebut masih buruk.

"Tetapi target penyelesaian pada 2014 terlalu panjang karena pada tahun itu jalannya bisa rusak lagi akibat buruknya

maintenance," ujarnya.

Mestinya, imbuh Hermanto, pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur itu selesai pada 2011 agar investor secara bertahap masuk pada 2012. "Percepatan infrastruktur ini akan membuat peluang investasi di *food estate* Merauke lebih *feasible* bagi investor," imbuh Hermanto.

Sebelumnya, seperti dikatakan Menko Perekonomian Hatta Rajasa, pemerintah menganggarkan Rp900 miliar untuk pembangunan infrastruktur di MIFEE. Proyek *food estate* yang masuk dalam program ketahanan pangan menengah itu diharapkan selesai pada 2014 (*Media Indonesia*, 25/1).

Ditemui terpisah, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto menegaskan, Kementerian PU telah menyelesaikan tender pembangunan tahap pertama (zona I) infrastruktur

MIFEE. Zona I itu meliputi perbaikan saluran irigasi dan akses jalan menuju kawasan.

"Pembangunannya akan dimulai dalam waktu dekat karena tendernya sudah selesai, sudah ada pemenang tendernya," ungkap Djoko sesuai rapat koordinasi rencana tata ruang di Kantor Menko Perekonomian, kemarin.

Percepatan infrastruktur akan membuat *food estate* Merauke lebih *feasible* bagi investor."

Pemerintah menganggarkan Rp13 miliar untuk pembangunan saluran irigasi di wilayah seluas 27 ribu hektare dan Rp130 miliar untuk infrastruktur pendukung, seperti akses jalan.

Pembangunan infrastruktur MIFEE rencananya dibangun dalam tiga zona berupa infrastruktur dasar, meliputi penataan air, infrastruktur jalan, dan

infrastruktur lain yang berkaitan dengan penataan *cluster*.

Wapres memantau

Sementara itu, untuk mengantisipasi ancaman ketahanan pangan sepanjang 2011, pemerintah akan menggenjot produksi pangan dan memastikan agar 12 daerah produsen pangan berhasil.

Wakil Presiden Boediono seperti dikatakan juru bicaranya, Yopie Hidayat, akan memantau dan melakukan evaluasi berkala untuk memastikan hal itu. Sebanyak 12 daerah produsen pangan tersebut tersebar di sembilan provinsi, di antaranya Sumatra Selatan, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

"Pemantauan diperlukan untuk mengidentifikasi kekurangan-kekurangan sehingga produksi naik di tengah krisis pangan dunia," papar Yopie.

Pemantauan juga ditujukan untuk mengantisipasi agar semua instrumen pendukung bisa mendorong proses distribusi

pangan menjadi lancar. "Mulai dari instrumen pendistribusian pupuk dan bibit oleh Kementerian Pertanian dan daerah, pengairan oleh Kementerian PU, serta dari segi pembiayaan oleh perbankan."

Di tempat lain, Asosiasi Perberasan Banyumas (APB) mengusulkan agar pemerintah menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dan beras jika ingin Bulog mampu menyerap hasil panen petani secara optimal.

"Ada dua keuntungan jika HPP dinaikkan, pendapatan petani lebih besar dan penyerapan pangan oleh Bulog lancar," Ketua APB Agus Purwanto.

Sementara itu, di Kalimantan Timur, upaya meningkatkan harga gabah petani dilakukan dengan cara membangun lumpung padi. Pemerintah provinsi memberikan bantuan lumpung dengan kapasitas 10 ribu ton gabah untuk tiap kecamatan. (Mad/CS/LD/SY/E-2)

asni@mediaindonesia.com

EKONOMIKA

Tambahan Subsidi Listrik tidak Tepat

WACANA penambahan subsidi sebesar Rp2,3 triliun dari asumsi APBN 2011 Rp40,7 triliun dinilai tidak tepat sasaran. Anggaran tersebut lebih baik digunakan untuk penambahan infrastruktur listrik perdesaan.

"Karena pelanggan industri totalnya sekitar 48 ribu sedangkan fasilitas *capping* atau pemberlakuan batas atas 18% hanya dinikmati 9.000 pelanggan," tutur Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform Fabby Tumiwa di Jakarta, kemarin.

Sebelumnya, anggota Komisi VII DPR RI yang membidangi energi Satya W Yudha mengusulkan penambahan alokasi subsidi listrik sebesar Rp2,3 triliun ketimbang melanjutkan regulasi pencabutan *capping*. (* / E-5)

Rapat Kreditur Mandala siap Digelar

PT Mandala Airlines (Mandala) akan melakukan rapat perdana dengan para krediturnya di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, pada 1 Februari mendatang.

"Dalam rapat kreditur itu, berisi pengajuan tagihan-tagihan kreditur ke pihak Mandala dan memverifikasinya sebagai bukti," ungkap kuasa hukum Mandala, Nien Raffles Siregar saat dihubungi, kemarin. Perseroan akan menginformasikan mengenai kondisi keuangannya. Pertemuan ini merupakan bagian dari proses restrukturisasi yang telah dimulai pada 13 Januari 2011. Sebelumnya, manajemen Mandala mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dikabulkan pada 17 Januari 2011 lalu oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. (* / Atp/E-5)

9 Perpres Tata Ruang Disiapkan

PEMERINTAH menyiapkan sembilan peraturan presiden (perpres) mengenai rencana tata ruang wilayah (RTRW) terkait dengan kawasan strategis nasional dan perbatasan. Perpres akan diselesaikan dalam dua pekan ke depan.

"(Terdiri atas) empat rencana tata ruang pulau dan lima rencana tata ruang kawasan strategis nasional," kata Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto di Jakarta, kemarin.

Sembilan Perpres RTRW itu, antara lain RTRW Sumatra, Jawa, Kalimantan, dan perpres RTRW Sulawesi. "Kemudian lima RTRW kawasan strategis nasional Metro Medan, Metro Denpasar, Metro Makassar, Kawasan Khusus Batam Bintan Karimun, dan perbatasan Kalimantan," ujarnya. (Tup/CS/E-5)

RI-India Kerja Sama US\$16,8 Miliar

INDONESIA dan India menandatangani nota kesepahaman kerja sama industri senilai US\$16,8 miliar yang melibatkan sektor swasta.

Penandatanganan dilakukan sesuai forum bisnis yang dihadiri sekitar 500 pengusaha India yang tergabung dalam Association of Chambers (Assocham), Confederation of India Industry (CII), serta Federation of Indian Chambers on Commerce and Industry (FICCI), di New Delhi, kemarin.

Selain menandatangani nota kesepahaman itu, sebelumnya Presiden menerima Anil Ambani (Ambani Group), Ratan Tata (Tata Group), Prasad Konetu (Trimex Group), serta Khrisna Reddy dan Sanjay (GVK Group).

Menteri Perindustrian MS Hidayat dalam siaran pers yang dirilis kemarin mengungkapkan perusahaan mineral berat asal India, Trimex Sands, akan membangun kompleks titanium terpadu dengan memanfaatkan sumber daya mineral berat *ilmenite* di Indonesia. Selain bisa memenuhi

kebutuhan titanium nasional, proyek senilai US\$850 juta itu diyakini akan menyediakan 2.000 lapangan kerja langsung dan 4.500 lapangan kerja tidak langsung.

"Indonesia memiliki sumber *ilmenite* yang besar, sekitar 40 juta ton. Namun, selama ini kita masih impor sekitar 46.000 ton pigmen titanium dioksida," kata MS Hidayat.

Sementara itu, Menteri Perhubungan RI Freddy Numberi mengatakan otoritas penerbangan sipil nasional menyediakan selot penerbangan sebanyak 28 kali per minggu untuk maskapai nasional yang hendak terbang ke India. Adapun jenis armada yang digunakan maksimal pesawat Boeing B 747-400 dengan kapasitas 428 kursi.

Hal yang sama juga berlaku untuk maskapai India yang terbang ke Indonesia. Keputusan itu tertuang dalam perjanjian hubungan udara (*air services agreement* / ASA) terbaru antara Indonesia dan India yang ditandatangani kemarin. Penandatanganan dilakukan Menteri Perhubungan RI dan Sekretaris Menteri Penerbangan Sipil India Syed Nasim Ahmad Zaidi. (Jaz/CS/Ant/E-4)



INDOGAS 2011:

Pengunjung berjalan di arena pameran Indogas 2011 di Jakarta, kemarin. Pameran yang berlangsung hingga 27 Januari tersebut menampilkan teknologi minyak dan gas dari berbagai perusahaan dan kontraktor yang beroperasi di Indonesia.

M/ROMMY PUJANTO

IMF Cermati Gejala Overheating Ekonomi Asia

LEMBAGA Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) mengidentifikasi dua problem utama dalam kacamata perekonomian global tahun ini. Salah satunya adalah banjir likuiditas ke negara-negara berkembang yang dapat menimbulkan *overheating*.

"Pertumbuhan tinggi di negara-negara pasar berkembang, dibarengi rendahnya tingkat bunga di negara-negara maju, terus memicu arus modal yang kuat ke wilayah Asia dan Amerika Latin," papar Kepala Ekonom IMF Oliver Blanchard seperti dilansir dalam situs resmi IMF, kemarin.

Hal itu menciptakan peluang dan tantangan bagi perekonomian negara berkembang. Peluang dalam arti besarnya likuiditas yang masuk akan menekan biaya pinjaman sehingga menjadi lebih murah. "Di sisi lain, kondisi itu dapat mengarah pada *overheating* dan gelembung ekonomi."

Dalam laporan World Economic Outlook (WEO) 2011 yang

dirilisnya kemarin, IMF mencermati sejumlah gejala *overheating* di negara-negara berkembang. Antara lain, IMF memproyeksikan inflasi di wilayah ini akan mencapai 6% pada 2011, atau naik 75 basis poin (bps) dari proyeksi semula pada Oktober lalu. Gejala *overheating* juga tampak pada beberapa negara yang

mengalami pertumbuhan kredit melejit atau kenaikan harga aset secara tajam.

Adapun salah satu faktor pemicu tekanan inflasi di negara-negara berkembang bersumber pada harga komoditas nonminyak, seperti pangan. Gagal panen yang disebabkan iklim diprediksi akan lebih buruk

ketimbang prakiraan semula, dan harga komoditas baru akan turun pascamusim panen 2011. Imbunya, komoditas pangan akan meningkat 11% pada tahun ini.

Sementara itu, IMF pun menilai prospek pertumbuhan yang lambat di negara maju menandakan masih tingginya tingkat pengangguran dan su-

litnya memangkas defisit.

Lembaga itu memprediksi pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju adalah 2,5%, sedangkan di negara-negara berkembang mencapai 6,6%. Secara umum, pertumbuhan perekonomian global pada 2011 ditaksir akan mencapai 4,5%.

Sementara itu, Direktur Pelaksana Riset Ekonomi dan Nilai Tukar Mata Uang Bank DBS Singapura David Carbon mengimbau Bank Indonesia untuk mulai menaikkan suku bunga acuan (BI rate). Jika pengetatan kebijakan moneter tidak dimulai pada triwulan I ini, kenaikan inflasi di Indonesia bisa tidak terkendali sehingga kontraproduktif bagi pertumbuhan ekonomi.

Sepanjang 2010, ujar David, tercatat 24 kenaikan suku bunga di seluruh Asia, kecuali Indonesia yang menahannya sejak Juli 2009. "Kami prediksi ada kenaikan suku bunga lagi di Asia sepanjang 2011. Ini utamanya dilakukan China, India, dan Singapura," ujar David. (* / AW/E-3)

Proyeksi Ekonomi Negara Berkembang Asia Pasifik 2011

Negara	Pertumbuhan Ekonomi 2010*	Pertumbuhan Ekonomi 2011*	Inflasi 2011*
Brunei Darussalam	0,49	1,01	1,80
Kamboja	4,68	6,82	5,16
China	10,46	9,59	2,71
Indonesia	6,00	6,20	5,50
Laos	7,74	7,49	5,67
Malaysia	6,72	5,30	2,10
Myanmar	5,26	5,01	9,13
Papua Nugini	7,96	5,54	7,98
Filipina	7,04	4,46	4,00
Thailand	7,52	4,00	2,76
Vietnam	6,47	6,82	8,00

Keterangan: * dalam %

Sumber: IMF/GRAFIS: TTYOK

3GSKY
Internet Broadband Berbasis Satelit Di Seluruh Indonesia
UNLIMITED
starting 384/64 Kbps
3G Net
YOUR BETTER AND FASTER INTERNET